

MORA2P2A4 : Penyempurnaan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) pada kawasan hutan primer dan lahan gambut setiap 6 (enam) bulan sekali

Target : Terlaksananya sistem mekanisme masukan public dalam revisi PIPIB secara online

Target B06/T14 : Tersampainya daftar masukan public untuk revisi PIPIB di website Kemenhut

Matrik dari Pemangku Kepentingan dan Respon terhadap Peta Indikasi Penundaan Izin Baru (PIPIB) (dari Desember 2013 - mei 2014)

No	Tanggal	Asal / Nomor Surat	Perihal	Kondisi/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggapan	Keterangan
92	November 2013	Direktur PT. Tunas Agung Sejahtera No. 055/2013	Permohonan revisi peta indikatif penundaan izin baru	Penutupan lahan berdasarkan hasil survey dan citra satelit tahun 2012 adalah hutan sekunder	Surat Dirjen Planologi No. S.1584/ VII-IPSDH/2013 tanggal 5 des 2013	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
93	November 2013	Bupati Pesisir Selatan No. 522.524/873/PP.1/Hut.ES DM/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013	Usulan revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru	Terdapat izin prinsip pembangunan pabrik dari bupati pesisir selatan	Surat Dirjen Planologi No. S.1625/ VII-IPSDH/2013 tanggal 12 des 2013	Tidak dilengkapi peta dan informasi luas sehingga revisi tidak dapat dilakukan	
94	November 2013	Direktur utama PT. Kaltara Mandiri nomor 234/SP/KM-TRK/XI/2013 tanggal 9 nov 2013	Hasil penelitian lahan areal PT. Kaltara Mandiri	Hasil survey terdiri dari lahan gambut 1.837 ha di areal sebuku dan 1.717 ha di areal sembakung	Surat Dirjen Planologi No. S.1636/VII-IPSDH/2013 tanggal 13 des 2013	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
95	Desember 2013	Direktur PT. Royale Kumala Indonesia no. 1/EKS/RKI/XII/2013	Penyampaian laporan identifikasi lahan PT. Royale Indonesia	Lahan gambut seluas 3.480 ha	Surat Dirjen Planologi No. S.28/VII-IPSDH/2014 tanggal 15 jan 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
96	Desember 2013	Direktur PT. Multi Anugrah Tata Abadi no. 1/Eks/MATA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2014	Penyampaian laporan identifikasi lahan PT. Multi Anugrah Tata Abadi	Lahan gambut seluas 574 ha	Surat Dirjen Planologi No. S.29/VII-IPSDH/2014 tanggal 15 jan 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
97	Desember 2013	Direktur PT. Hijau Lingkungan Sawit Indah nomor 1/EKS/HLSI/XII/2013	Penyampaian laporan identifikasi lahan PT. Hijau Lingkungan Sawit Indah	Semua areal terdiri dari tanah mineral	Surat Dirjen Planologi No. S.16/VII-IPSDH/2014 tanggal 9 jan 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI

No	Tanggal	Asal / Nomor Surat	Perihal	Kondisi/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggapan	Keterangan
98	Desember 2013	Direktur PT Bumi Orion Sawit Sukses nomor 1/EKS/HLSI/XII/2013	Hasil penelitian lahan PT Bumi Orion Sawit Sukses	Lahan gambut seluas 7.234 ha	Surat Dirjen Planologi No. S.30/VII-IPSDH/2014 tanggal 15 jan 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
99	Desember 2013	Bupati Lima Puluh Kota nomor. 522/4011/huttam-LK/XII/2013	Hasil penelitian lahan PT Sumatera Sumber Mineral	Bukan merupakan hutan primer	Surat Dirjen Planologi No. S.27VII-IPSDH/2014 tanggal 15 jan 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
100	Maret 2014	Direktur Ahmad Saleh Perkasa nomor. 42/ASP/PKN/II/2014	Usulan pengeluaran areal dari PIPPIB Rev V	Lahan gambut seluas 587 ha	Surat direktur S. 84/IPSDH-3/2014 tanggal 21 Maret 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
101	Maret 2014	Direktur Utama PT. Surya Borneo Industri nomor 20/SBI/PKN/II/2014	Usulan pengeluaran areal dari PIPPIB Rev V	Lahan gambut seluas 157 ha	Surat direktur S. 83/IPSDH-3/2014 tanggal 21 Maret 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
102	Januari 2014	Dishut Pemprov Sumatera Barat nomor 522.1/089/pk-2014	Hasil survey lapangan ruas jalan lubuk taren-bonai	Bukan primer	Hanya tembusan	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
103	Januari 2014	Dishut Pemprov Sumatera Barat nomor 522.1/088/pk-2014	Hasil survey lapangan ruas jalan kapujan-rimbopata	Bukan primer	Hanya tembusan	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
104	Januari 2014	Dishut Pemprov Sumatera Barat nomor 522.1/086/pk-2014	Hasil survey lapangan	Bukan primer	Hanya tembusan	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
105	Januari 2014	Dishut Pemprov Sumatera Barat nomor 522.1/090/pk-2014	Hasil survey lapangan ruas jalan geduang-lubuk rasam	Bukan primer	Hanya tembusan	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
106	Januari 2014	Dishut Pemprov Sumatera Barat nomor	Hasil survey lapangan ruas jalan batu	Bukan primer	Hanya tembusan	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan	Bahan revisi PIPPIB REV VI

No	Tanggal	Asal / Nomor Surat	Perihal	Kondisi/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggapan	Keterangan
		522.1/091/pk-2014	bajanjang-garabak			izin baru	VI
107	Januari 2014	Dishut Pemprov Sumatera Barat nomor 522.1/071/pk-2014	Hasil survey lapangan	Bukan primer	Hanya tembusan	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
108	Januari 2014	PT. Tunas Agung sejahtera nomor 015/2014	Hasil survey	Bukan primer		Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
109	Februari 2014	Direktur PT. sumatera Candi Kencana	Permohonan revisi PIPPIB atas perpanjangan HGU PT. Sumatera Candi Kencana	Hasil surveu gambut bahwa seluruhnya bukan lahan gambut	Surat Dirjen Planologi nomor S. 357/VII-IPSDH/2014 tanggal 10 April 2014	Areal yang lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
110	Februari 2014	Dishut Palu (PT. Bintang Delapan Mineral)	Hasil survey hutan primer rencana pembangunan penambahan jalan angkut bijih nikel PT. Bintang Delapan Minerl	Dari hasil survey yang dilakukan oleh Dishut Prov. Sulawesi Tengah, penutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder	Surat Dirjen Planologi nomor S. 318/VII-IPSDH/2014 tanggal 28 Maret 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
111	Maret 2014	Direktur PT. Wira Antara	permohonan pembebasan moratorium	Dari hasil survey yang dilakukan oleh Dishut dan konservasi Prov. Papua, Dishut. Kab Jayapura, dan UNP, penutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder dan perladangan	Surat Dirjen Planologi nomor S. 268/VII-IPSDH/2014 tanggal 19 Maret 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
112	Februari 2014	Direktur PT. Jabontara Eka	Permohonan verifikasi lahan gambut an. PT. Jabontara Eka Karsa	Sesuai hasil survey seluruhnya bukan lahan gambut	Surat Dirjen Planologi nomor S. 366/VII-IPSDH/2014 tanggal 15 April 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
113	Maret 2014	PT. Anugrah Szalzu Sejahtera	Permohonan konfirmasi status dan revisi PIPPIB areal perkebunan PT.	Sesuai seurvey lahan, bukan merupakan lahan gambut	Surat Dirjen Planologi nomor S. 362/IPSDH - 3/2014 tanggal 11 April 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI

No	Tanggal	Asal / Nomor Surat	Perihal	Kondisi/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggapan	Keterangan
			Anugrah Salzu Sejahtera				
114	Maret 2014	Direktur utama Grand LJ Fullerton Successful No. 02-25/03/2014	Laporan Hasil Cek Lapangan	Hasil survey penutupan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang serta Fakultas Kehutanan Univ. Tanjung Pura merupakan hutan sekunder, tidak berhutan, semak belukar dan pertanian	Surat Dirjen Planologi nomor S. 120/IPSDH - 3/2014 tanggal 14 April 2014	Bahwa hasil survey dilaksanakan dengan berbasis Citra Resolusi Tinggi (CSRT)	Sementara menunggu CSRT
115	Maret 2014	Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau no. 2.PPIB/DPKP/HUT/III/2014	Laporan hasil survey an. PT Huafa Aset Indonesia	Hasil survey penutupan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Prov. Kepri, dan Kota Batam serta univ. Lancang Kuning merupakan bukan hutan primer	Surat Dirjen Planologi nomor S. 383/IPSDH - 3/2014 tanggal 23 April 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
116	Maret 2014	PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi nomor 45/A.7/SSJA-1/III/2014	Klarifikasi status kawasan hutan	Telah mendapat izin lokasi dari Bupati Pesisir Selatan sesuai SK. No. 58 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2014	Surat Dirjen Planologi nomor. S. 415/VII-IPSDH/2014 tanggal 6 Mei 2014	PIPIB tidak berlaku terhadap izin sebelum Inpres 10 Tahun 2011	Bahan revisi PIPPIB REV VI
117	April 2014	Direktur PT. Rimba Rokan Lestari	Penyampaian hasil survey PT. Rimba Rokan Lestari	Sesuai survey lahan, bukan merupakan lahan gambut	Surat Dirjen Planologi nomor S. 390/IPSDH - 3/2014 tanggal 24 April 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
118	April 2014	Direktur PT. Persada Baru	Penyampaian hasil survey PT. Perkasa Baru	Sesuai survey lahan, bukan merupakan lahan gambut	Surat Dirjen Planologi nomor S. 391/IPSDH - 3/2014 tanggal 24 April 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
119	April 2014	Direktur utama PT. Sinar	Permohonan revisi	Telah mendapatkan izin	Surat Dirjen Planologi	PIPIB tidak berlaku	Bahan revisi

No	Tanggal	Asal / Nomor Surat	Perihal	Kondisi/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggapan	Keterangan
		Karya Mandiri nomor 003/EXT/SKM-LGL/03/IV/2014	penetapan PIPPIB pada IUP PT. Sinar Karya	lokasi berdasarkan SK Bupati Ketapang Nomor : 160 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005	nomor. S. 438/VII-IPSDH/2014 tanggal 8 Mei 2014	terhadap izin sebelum Inpres 10 Tahun 2011	PIPPIB REV VI
120	Maret 2014	Direktur Utama Perum Perhutani	Telaahan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB)	IUPHHKBK Bupati Sorong Selatan SK. No. 522/223BSS/XII tanggal 14 Desember 2012 digunakan melaksanakan pengembangan industri sagu	Surat Dirjen Planologi nomor S. 385/IPSDH - 3/2014 tanggal 23 April 2014	Sesuai dengan Inpres 6 tahun 2013 Amar Kegua bahwa PIPPIB dikecualikan untuk pembangunan nasional bersifat vital yaitu geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk pagi dan tebu.	Bahan revisi PIPPIB REV VI (tidak dilampirkan peta)
121	April 2014	Kepala Dinas Prov. Jawa Timur	Revisi PIPPIB IUP PT. Bumi Suksesindo	Hasil survey penutupan lahan yang dilakukan oleh Dishut Jatim, Dishutbun Kab. Banyuwangi, UGM merupakan bukan hutan primer	Surat Dirjen Planologi nomor S. 406/IPSDH - 3/2014 tanggal 28 April 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
122	April 2014	Kepala Dishut Kabupaten Malinau	Permohonan pevisi PIPPIB	Hasil survey penutupan lahan yang dilakukan oleh Dishut Kaltara, Dishut Kab. Malinau, Unv. Mulawarman merupakan perkampungan, jalan setapak, perladangan dan perkebunan	Surat Dirjen Planologi nomor S. 416/IPSDH - 3/2014 tanggal 6 Mei 2014	Areal yang bukan hutan primer dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPPIB REV VI
123	April 2014	Direktur PT. Cipta Tumbuh Berkembang	Permohonan revisi PIPIB	Telah mendapat SK Bupati Pontianak Nomor 361 tahun 2007 tanggal 13 November 2013	Surat Dirjen Planologi nomor. S. 400/VII-IPSDH/2014 tanggal 8 Mei 2014	PIPPIB tidak berlau terhadap izin sebelum Inpres 10 Tahun 2011	Bahan revisi PIPPIB REV VI
124	April 2014	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur	Revisi lokasi pengembangan KIPI Maloy	Telah mendapat izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor. 641.6/K.945/HK/XI/2010 tanggal 10 november 2010	Surat Dirjen Planologi nomor. S. 401/VII-IPSDH/2014 tanggal 8 Mei 2014	PIPPIB tidak berlau terhadap izin sebelum Inpres 10 Tahun 2011	Bahan revisi PIPPIB REV VI

No	Tanggal	Asal / Nomor Surat	Perihal	Kondisi/ Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggapan	Keterangan
125	Mei 2014	Direktur Utama PT. Perdana Intisawit Perkasa	Penyampaian laporan Identifikasi Lahan Areal PT. Perdana Intisawit Perkasa	Sesuai servey lahan bahwa merupakan tanah minerl	Surat Dirjen Planologi nomor. S. 468/VII- IPSDH/2014 tanggal 16 Mei 2014	Areal yang bukan lahan gambut dapat diberikan izin baru	Bahan revisi PIPIB REV VII